

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Subarto, Istianto, B., & Suharti, E. (2015). *Karakteristik Angkutan Umum Transportasi Jalan di Indonesia*.
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. (2016). Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi; (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). In *Hukum: Vol. (Issue)*.
- Dr. Lukman Hakim, S.H., M. H. (2020). *Asas-asas hukum pidana* (A. H. Zein (ed.)). Deepublish publisher.
- Chazawi, A. (2013). *Tindak pidana pornografi* (S. Fee (ed.); Cetakan pe). Bayu Media Publishing.

### Undang-Undang Terkait:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### Jurnal

- Bidin a. (2017). Metode penemuan hukum (interpretasi dan konstruksi) dalam rangka harmonisasi hukum. *Вестник росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Dr. Fiona amelia mph. (2019). *Mengapa pelaku eksibisionis lebih banyak ditemukan pada pria?* [Https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/mengapa-pelaku-eksibisionis-lebih-banyak-ditemukan-pada-pria](https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/mengapa-pelaku-eksibisionis-lebih-banyak-ditemukan-pada-pria)
- Sumarno, & Alrianingrum, S. (2020). *Pendidikan Nilai dan Karakter*.
- Firmansyah, f. A. (2022). *Metode penemuan hukum: bentuk-bentuk interpretasi terhadap undang-undang*. [Https://heylaw.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang](https://heylaw.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang)
- Hanifah, f. N., & muliawan, a. (2020). Implementasi penerapan penafsiran hakim tentang pelanggaran unsur bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jca of law*, 1(1), 117–127. [Https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/13](https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/13)
- Hello flokq. (n.d.). *Angkot: transportasi umum klasik jakarta*. [Https://www.flokq.com/blog/angkot-transportasi-umum-klasik-jakarta](https://www.flokq.com/blog/angkot-transportasi-umum-klasik-jakarta)
- Pang, n. T. P., masiran, r., & alimuddin, a. S. (2023). Paraphilia without symptoms of primary psychiatric disorder: a case report. *Journal of medical case reports*, 17(1), 4–7. [Https://doi.org/10.1186/s13256-023-03774-8](https://doi.org/10.1186/s13256-023-03774-8)

Peraturan pemerintah ri. (2007). Peraturan pemerintah (pp) nomor 23 tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara republik indonesia. *Ятыамам*, 235, 245. <Http://digilib.unila.ac.id/4949/15/bab ii.pdf>

Weruin, u. U., andayani, d., & atalim, s. (2016). Hermeneutika hukum: prinsip dan kaidah interpretasi hukum legal hermeneutics: principles and rules of legal interpretation. *Konstitusi*, 13(1), 95–123.

Yulia, r., herli, d., & prakarsa, a. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal hukum & pembangunan*, 49(3), 661.

<Https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.219>